

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk melihat seberapa besar keberhasilan suatu Negara dalam bidang perekonomian. Pertumbuhan ekonomi melihat bagaimana aktivitas perekonomian berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan pada masyarakat di suatu negara pada periode tertentu. Selain itu, pertumbuhan ekonomi juga menggambarkan bagaimana perekonomian dengan barang dan jasa yang besar bisa secara lebih baik memenuhi permintaan rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah (Zuldareva, 2017).

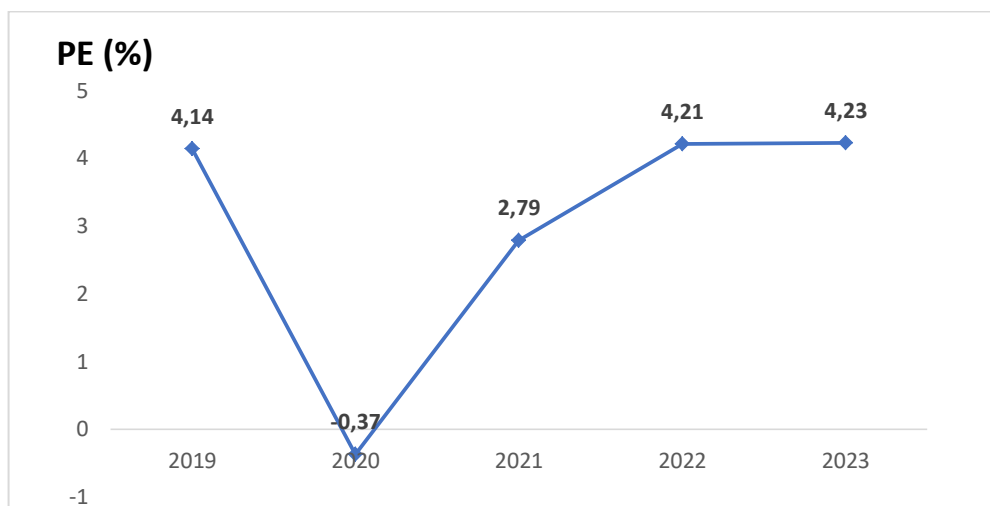
Menurut Todaro, pembangunan ekonomi dianggap berhasil apabila suatu negara berhasil meningkatkan perekonomian atau yang disebut juga sebagai pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah serangkaian usaha dalam mengembangkan perekonomian suatu negara guna penyediaan infrastruktur semakin banyak, tingkat pendidikan yang semakin tinggi dan teknologi yang semakin maju (Alfisyahri, *et.al*, 2020).

Salah satu tujuan dari pertumbuhan ekonomi yaitu memberikan kesejahteraan terhadap masyarakat melalui aktifitas-aktifitas yang menunjang kondisi ekonomi pada suatu periode. Selanjutnya manfaat dari pertumbuhan ekonomi yang baik juga akan membantu suatu negara atau wilayah menghadapi krisis yang terjadi. Hal ini terjadi karena di saat ekonomi sedang tumbuh dengan baik maka negara atau wilayah tersebut memiliki kemampuan dan daya tahan

ekonomi yang kuat dan mampu menghadapi perubahan ekonomi global yang terus berubah.

Pertumbuhan ekonomi ialah ukuran prestasi dari perkembangan suatu perekonomian dari suatu periode ke periode berikutnya dan juga dari satu periode ke periode lainnya kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat yang akan dapat dipakai untuk mensejahterakan masyarakat. Pertumbuhan Ekonomi suatu negara diukur dari pengembangan produk domestik bruto riil yang dicapai oleh suatu negara, wilayah/daerah. *Economic Growth* ialah aktivitas dalam dunia ekonomi berefek pada barang dan jasa yang diproduksi di masyarakat bertambah dan kemakmuran meningkat (Yanis, 2018).

Pertumbuhan ekonomi bisa dikatakan akibat dari kenaikan jumlah produksi suatu perekonomian dan diwujudkan dalam bentuk peningkatan pendapatan nasional. Perekonomian disebutkan tumbuh ketika jumlah balas jasa riil terhadap penggunaan faktor-faktor produksi pada tahun tertentu lebih besar dari pada tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi harus mengarah pada standar hidup yang lebih tinggi nyata dan kerja meningkat. Pertumbuhan Ekonomi dapat diartikan peningkatan output agregat atau pendapatan riil. Kedua peningkatan tersebut biasanya di hitung perkapita atau selama jangka waktu yang cukup panjang sebagai akibat peningkatan penggunaan input (Sunarto & Sunyoto, 2016), Provinsi Aceh merupakan provinsi di Indonesia yang telah menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Adapun perkembangan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh tahun 2019 sampai 2023 sebagai berikut:



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), Aceh 2024

**Gambar 1.1**  
**Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh Tahun 2019-2023(%)**

Gambar 1.1 menunjukkan tingkat pertumbuhan ekonomi di Aceh mengalami fluktuasi yang menurun pada tahun 2020 mengalami peningkatan kembali pada tahun 2021. Pada tahun 2019-2023 laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh terus mengalami peningkatan masing-masing sebesar 4,14 persen, 4,23 persen. Kemudian pada tahun 2020 laju pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan sebesar -0,37 persen, hal ini disebabkan karena menurunnya produksi migas baik di pertambangan maupun industri (Mononimbar, *et al.*, 2017).

Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan menjadi penggerak utama pertumbuhan dari sisi penawaran. Sedangkan dari sisi permintaan, Konsumsi Rumah Tangga memiliki kontribusi terbesar pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi menurun pada tahun 2020 yaitu sebesar -0,37 persen. Hal ini juga merupakan dampak dari COVID19 yang melanda seluruh provinsi di Indonesia termasuk Provinsi Aceh. Pada tahun 2020 kondisi pertumbuhan ekonomi berada di titik terendah yang sudah mencapai minus yang disebabkan oleh awal mulainya pandemi COVID-19. Pembatasan sosial yang diberlakukan

oleh pemerintah untuk mengendalikan penyebaran COVID-19 menyebabkan banyak sektor ekonomi yang terganggu. Sektor-sektor yang paling terdampak termasuk pariwisata, transportasi, perdagangan, serta industri manufaktur dan konstruksi (Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, 2021).

Namun, pada tahun 2021-2023 kondisi perekonomian Aceh mengalami kenaikan. Hal tersebut terjadi karena berbagai upaya kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mengatasi pandemi COVID-19 agar pertumbuhan ekonomi membaik. pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh yang membaik pada tahun 2021-2023 merupakan hasil dari kombinasi faktor-faktor seperti pemulihan dari dampak pandemi, peningkatan harga komoditas, dukungan dari pemerintah pusat, dan keberhasilan dalam meningkatkan sektor-sektor unggulan daerah seperti perdagangan, pertanian, perikanan, dan pariwisata. Selain itu, stabilitas politik dan peningkatan infrastruktur juga menjadi pendorong utama bagi pemulihan dan pertumbuhan ekonomi yang lebih positif di Aceh. Badan Pusat Statistik (BPS), Aceh (2023).

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah sangat dipengaruhi oleh pemanfaatan sumber daya alam (SDA) yang dimilikinya. SDA menjadi salah satu faktor utama dalam mendukung aktivitas ekonomi, terutama di daerah yang kaya akan hasil hutan dan perikanan seperti Provinsi Aceh. Sumber daya tersebut tidak hanya menjadi penyedia bahan baku, tetapi juga membuka lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Dalam konteks pembangunan daerah, pemanfaatan SDA secara optimal dan berkelanjutan berperan penting dalam

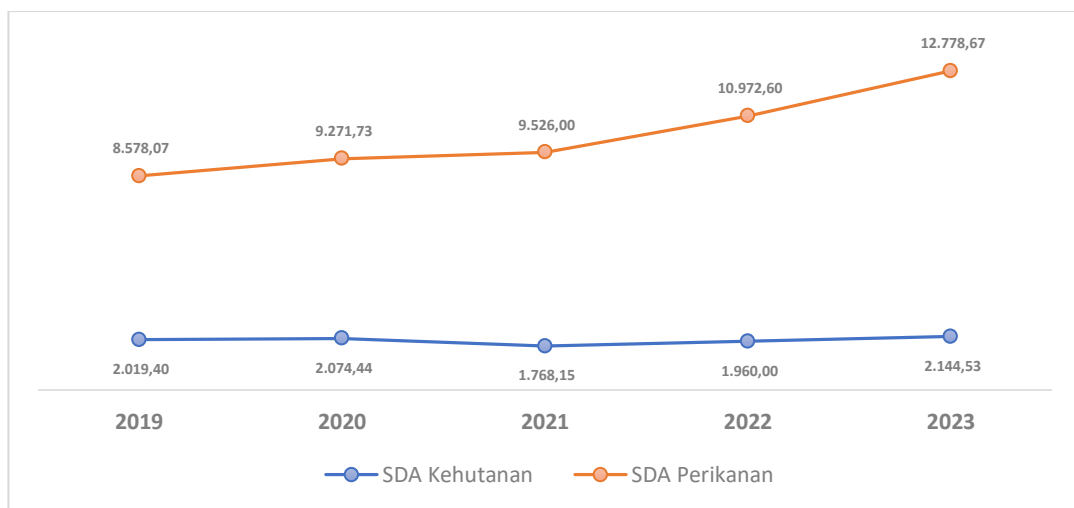
meningkatkan pendapatan domestik regional bruto (PDRB). Menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan (2020), sektor kelautan dan perikanan berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional melalui produksi, ekspor, dan penyerapan tenaga kerja.

Sektor kehutanan merupakan salah satu sektor unggulan yang mendukung pertumbuhan ekonomi, khususnya di wilayah dengan kawasan hutan yang luas seperti Aceh. SDA kehutanan mencakup hasil hutan kayu dan non-kayu serta jasa lingkungan. Berdasarkan penelitian Tanjung *et al.*, (2022), pengelolaan hutan berbasis masyarakat, seperti skema hutan desa, mampu meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar dan menjadi salah satu strategi untuk menurunkan kemiskinan di kawasan hutan. Selain itu, program perhutanan sosial di Aceh juga dinilai efektif dalam memperkuat ekonomi lokal melalui pemberdayaan masyarakat dan diversifikasi usaha hasil hutan (Hapsari *et al.*, 2021). Dengan pengelolaan yang tepat, SDA kehutanan tidak hanya menjaga keberlanjutan lingkungan, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Sementara itu, sektor perikanan di Provinsi Aceh memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama karena letaknya yang strategis dan memiliki wilayah laut yang luas. SDA perikanan memberikan kontribusi signifikan terhadap PDRB melalui kegiatan penangkapan ikan, budidaya, dan pengolahan hasil laut. Laporan Kementerian Kelautan dan Perikanan (2020) menyebutkan bahwa subsektor perikanan menjadi andalan dalam pembangunan ekonomi kawasan pesisir. Namun, pengelolaan yang kurang optimal, termasuk rendahnya akses teknologi dan pasar, masih menjadi tantangan bagi nelayan.

Menurut penelitian Yulfita *et al.*, (2021), pengembangan industri perikanan tangkap dan budidaya di Aceh dapat meningkatkan pendapatan nelayan serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif, terutama di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Berikut perkembangan SDA kehutanan dan perikanan di Provinsi Aceh tahun 2019 sampai 2023 sebagai berikut :



Sumber : Badan Pusat Statistik (2024)

**Gambar 1.2 Sumber Daya Alam Kehutanan dan Perikanan (Miliar)**

Gambar 1.2 menunjukkan perkembangan sumber daya alam (SDA) kehutanan di Provinsi Aceh selama periode 2019–2023 yang mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019, SDA kehutanan tercatat sebesar 2.019,40 miliar dan meningkat menjadi 2.074,44 miliar pada tahun 2020. Namun, pada tahun 2021 nilainya menurun menjadi 1.768,15 miliar sebelum kembali naik pada tahun 2022 sebesar 1.960,00 miliar dan mencapai 2.144,53 miliar pada tahun 2023. Kenaikan signifikan di tahun 2023 ini menunjukkan adanya penguatan pengelolaan sektor kehutanan, baik melalui pemanfaatan hasil hutan kayu maupun non-kayu, yang

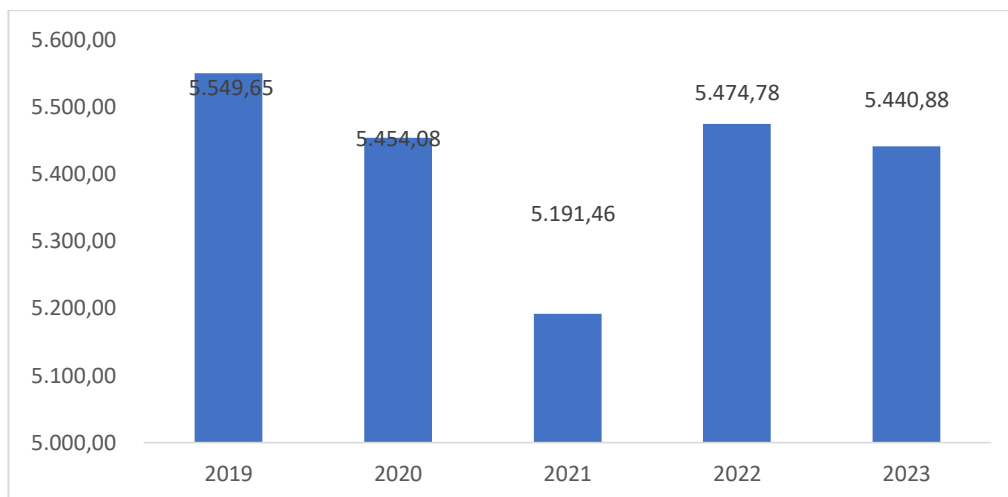
kemungkinan juga dipengaruhi oleh perbaikan kebijakan dan pengawasan pengelolaan hutan di Aceh.

Sementara itu, SDA perikanan di Aceh menunjukkan tren peningkatan yang cukup konsisten. Pada tahun 2019, nilainya tercatat sebesar 8.578,07 miliar dan terus meningkat menjadi 9.271,73 miliar pada 2020. Tahun 2021 mengalami kenaikan tipis menjadi 9.526,00 miliar, lalu melonjak pada 2022 menjadi 10.972,60 miliar, dan kembali meningkat signifikan pada 2023 mencapai 12.778,67 miliar. Peningkatan ini mencerminkan bertambahnya produktivitas sektor perikanan, baik perikanan tangkap maupun budidaya, yang didukung oleh ketersediaan sumber daya laut Aceh yang melimpah serta dukungan kebijakan pemerintah daerah. Tren positif ini menunjukkan bahwa sektor perikanan menjadi salah satu pilar penting dalam perekonomian Aceh.

Kedua sektor SDA tersebut memiliki keterkaitan erat dengan laju pertumbuhan ekonomi (PE) di Provinsi Aceh. Meskipun SDA kehutanan dan perikanan meningkat pada tahun 2020, pertumbuhan ekonomi justru mengalami kontraksi sebesar -0,37 persen akibat dampak pandemi COVID-19 yang melumpuhkan banyak sektor produktif lainnya. Namun, sejak tahun 2021, pertumbuhan ekonomi mulai pulih seiring dengan meningkatnya kembali aktivitas ekonomi masyarakat. Pada tahun 2022 dan 2023, pertumbuhan ekonomi tercatat positif masing-masing sebesar 4,21 persen dan 4,23 persen, seiring dengan peningkatan output dari sektor-sektor andalan seperti kehutanan dan perikanan. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan dan pemanfaatan SDA secara efektif dan

berkelanjutan dapat menjadi faktor pendorong penting dalam mendukung stabilitas dan pertumbuhan ekonomi suatu daerah

Selain itu, Pendapatan Asli Daerah juga erat kaitannya dengan Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Melania, 2022). Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain–lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaa dalam pelaksana anotonomi daerah sebagai mewujudkan asas desentralisasi (Rori *et al.*, 2016). Adapun perkembangan pendapatan asli daerah di Provinsi Aceh tahun 2019 sampai 2023 sebagai berikut:



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), Aceh 2024

**Gambar 1.3**  
**Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Aceh (Miliar Rp)**



Gambar 1.3 menunjukkan perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Aceh selama periode 2019–2023 yang mengalami fluktuasi. Pada tahun 2019, PAD tercatat sebesar Rp5.549,65 miliar dan menurun pada 2020 menjadi Rp5.454,08 miliar. Penurunan ini dapat dikaitkan dengan dampak pandemi COVID-19 yang menyebabkan perlambatan aktivitas ekonomi, sehingga berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah dan retribusi. Kondisi ini semakin memburuk pada 2021, di mana PAD turun signifikan menjadi Rp5.191,46 miliar akibat pembatasan mobilitas dan berkurangnya kegiatan bisnis di berbagai sektor. Namun, pada 2022 PAD kembali meningkat menjadi Rp5.474,78 miliar, diikuti oleh penurunan tipis pada 2023 menjadi Rp5.440,88 miliar.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Aceh pada periode 2020-2023 dipengaruhi oleh berbagai faktor yang bersifat internal dan eksternal. Pemulihan ekonomi pasca-pandemi, peningkatan harga komoditas, kebijakan yang lebih efisien dalam pengelolaan pajak, serta dukungan dari pemerintah pusat melalui berbagai kebijakan fiskal turut memperkuat kemampuan Aceh untuk mengoptimalkan sumber daya pendapatan daerahnya. Selain itu, sektor-sektor seperti pariwisata, konstruksi, pertanian, dan perikanan yang mengalami pemulihan juga memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan (PAD) selama periode tersebut.

Penelitian Zuweaty Eka putri, (2015) menyatakan pendapatan asli daerah (PAD) mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota provinsi Jawa Tengah. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mawarni *et al.*, (2013) dan Ulfi (2010).

Mengukur kemandirian fiskal daerah dengan melihat hanya dari kemampuan daerah dalam memungut PAD adalah merupakan hal yang tidak logis karena secara teori, pajak sangat tergantung kepada kegiatan bisnis dan industri di daerah tersebut. Membandingkan Aceh dengan DKI Jakarta misalnya yang kegiatan bisnis dan industrinya cukup signifikan adalah “*false comparable*” atau perbandingan yang keliru. Disamping itu kewenangan yang terbatas bagi daerah untuk memungut pajak “gendut” juga merupakan hambatan yang diciptakan sehingga kemungkinan PAD untuk mampu membiayai daerah sendiri adalah suatu utopia atau mimpi yang tidak mungkin dicapai. (Simanungkalit, 2023)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara Pajak Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pertumbuhan Ekonomi. Pemahaman yang lebih dalam tentang hubungan ini dapat membantu pemerintah dan pemangku kepentingan dalam merancang kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Aceh. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik menganalisis “ **Pengaruh SDA Kehutanan, SDA Perikanan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh**”

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh SDA kehutanan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh?

2. Bagaimana pengaruh SDA Perikanan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh ?
3. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh?
4. Bagaimana pengaruh SDA Kehutanan, SDA Perikanan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini dibuat berdasarkan adanya perumusan masalah diatas, adapun tujuannya yaitu sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh SDA kehutanan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh?
2. Mengetahui pengaruh SDA Perikanan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh?
3. Mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh?
4. Mengetahui pengaruh SDA Kehutanan, SDA Perikanan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh?

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dapat diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi atau masukan bagi pengembangan ilmu ekonomi dan juga menambah kajian mengenai ilmu ekonomi :

1. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan, wawasan, serta informasi yang lebih mendalam mengenai pengaruh SDA kehutanan, SDA Perikanan dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh.
2. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambahkan literature ilmiah yang relevan tentang pengaruh SDA kehutanan, SDA Perikanan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan hasil penelitian ini dapat di gunakan sebagai sumber referensi dalam studi kedepannya yang terkait dengan tema yang sama.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan mampu menjadi salah satu bahan referensi untuk pemerintah dalam membuat kebijakan dalam meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Aceh dengan memperhatikan pengaruh dari SDA kehutanan, SDA Perikanan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Penelitian ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kemampuan keputusan dalam mengambil keputusan yang lebih efektif dalam meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dengan memperhatikan SDA kehutanan, SDA Perikanan

dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk mengembangkan kebijakan yang lebih efektif.